

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KRPL
(KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI)
GUNA MENUNTASKAN KEMISKINAN DI DESA KEDIRI,
KECAMATAN GADING REJO, KABUPATEN
PRINGSEWU**

(Skripsi)

Oleh

RAHMAT TAUFIQ



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KRPL (KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI) GUNA MENUNTASKAN KEMISKINAN DI DESA KEDIRI, KECAMATAN GADING REJO, KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

RAHMAT TAUFIQ

Penelitian ini mengarah kepada pemberdayaan yang mengacu kepada masyarakat yaitu melalui gapoktan tujuan dari pemberdayaan ini untuk penelitian mengetahui dan menganalisis fungsi Gapoktan Sekar Tani di Desa kediri, Kecamatan Gading rejo, Kabupaten Pringsewu dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat program Gapoktan Sekar Tani yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat desa. Kegunaan dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup melalui Gapoktan. Secara praktis diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para peneliti tentang peranan lembaga yang berorientasi pada kelompok tani masyarakat.

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KRPL (KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI) GUNA MENUNTASKAN KEMISKINAN DI DESA KEDIRI, KECAMATAN GADING REJO, KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

RAHMAT TAUFIQ

This study leads to empower inhabitants through gapoktan. the aims of this study were to find out and analyze the function of gapoktan sekar tani in Kediri village, gading rejo subdistrict, pringsewu district in assigning poverty in the village. to identify the factors which affect the success of the implementation of gapoktan sekar tani program in assigning poverty in the village. theoretically, the aim of this study was expected to give knowledge about inhabitants empowerment in increasing live level through gapoktan. it was practically expected to provide additional reference for researchers about the role of community which oriented to farmers group

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KRPL
(KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI)
GUNA MENUNTASKAN KEMISKINAN DI DESA KEDIRI,
KECAMATAN GADING REJO, KABUPATEN
PRINGSEWU.**

Oleh

RAHMAT TAUFIQ

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat dalam KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) Guna Menuntaskan Kemiskinan di Desa Kediri, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu.

Nama : Rahmat Taufiq

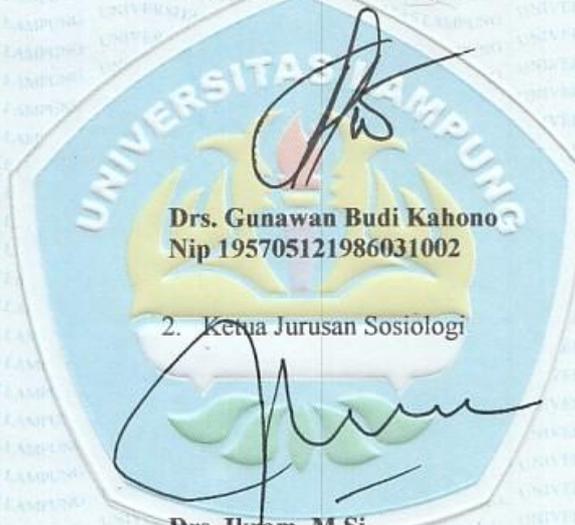
Nomor Pokok Mahasiswa : 1316011059

Jurusan : Ilmu Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

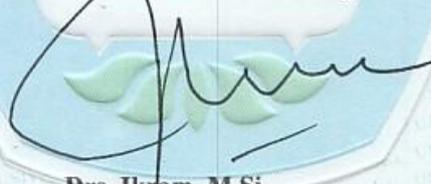
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Gunawan Budi Kahono
Nip 195705121986031002

2. Ketua Jurusan Sosiologi



Dr. Ikram, M.Si
Nip 196106021989021001

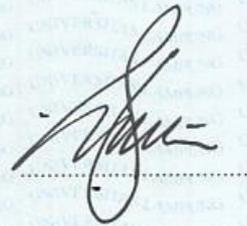
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Gunawan Budi Kahono



**Penguji
Bukan Pembimbing** : Dra. Paraswati Darilmilyan



Dekan Fakultas ilmu sosial dan imu politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 196008011986031003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi 25 Agustus 2017

PERNYATAAN

Dengan ini Saya Menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (master sarjana/ahli madya), baik di Universitas Lampung perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya tuis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung 16 Agustus 2017
Yang membuat pernyataan,



Rahmat taufiq
Npm: 1316011059

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk:

ALLAH SWT

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Kakak dan Adikku tercinta

Sahabat dan teman seangkatan dan seperjuangan

Seluruh Keluarga Besarku

dan Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Fajar Baru 10 Juni 1994, anak ketiga dari lima bersaudara, putra dari pasangan Sutrisno dan Marwiyah. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah Sekolah Taman Kanak-kanak Kartika Fajar Baru yang diselesaikan 2001. Sekolah Dasar Negeri 1 Fajar Baru diselesaikan 2007. Sekolah Menengah Pertama Gajah Mada Bandar Lampung diselesaikan 2010. Sekolah Menengah Atas Gajah Mada Bandar Lampung diselesaikan 2013.

Pada 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MOTTO

Untuk sukses, Anda harus menerima semua tantangan yang mendatangi Anda.
Anda tak bisa hanya menerima tantangan yang Anda sukai!
(Mike Gafka)

Jangan menunda sampai esok apa yang dapat Anda lakukan hari ini!

*Do what you love
and
Love what you do!*
(Imam Munabi)

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) Guna Menuntaskan Kemiskinan di desa Kediri, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu”.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Drs. Gunawan Budi Kahono., komisi pembimbing utama skripsi yang telah memberikan saran, bimbingan dan nasihat kepada penulis.
2. Dra. Paraswati Darilmilyan., sebagai dosen pembahas yang telah memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Drs. I Gede Sidemen, M.Si., pembimbing akademik.
4. Drs. Ikram, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
5. Drs. Susetyo, M.Si., selaku Dekan FISIF Universitas Lampung, beserta stafnya.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Sosiologi yang telah memberi penulis dengan berbagai ilmu yang bermanfaat.

7. Retno Putri dan levisia selaku mahasiswa pembahas yang membatu membahas sekripsi yang penulis tulis.
8. Orang tuaku tercinta Sutrisno dan Marwiyah yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan dalam bentuk moral maupun material dan untaian doa yang tiada terputus untuk keberhasilanku.
9. Kakakku terkasih Mutattohirin dan Siti Komsiyah, serta adik-adikku tersayang Indah Sekar Ayu dan Riska Khoirunnisa yang selalu memberikan semangat.
10. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu mendampingi. Serta Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Jurusan Ilmu Sosiologi yang telah melewati dan bersama-sama dalam susah dan senang atau suka dan duka penulis tidak akan pernah melupakan kalian semua.
11. Untuk saudara-saudaraku yang telah membantu dalam banyak hal. Terimakasih atas dukungan kalian.
12. Untuk teman-temanku terutama rio permono(olex), jirwan sidik, wahyu adi wibowo, heru jalal, ipin, lovvi, catur, adit dan teman-teman sosiologi yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Bandarlampung, 20 Agustus 22017

Penulis,

Rahmat Taufiq

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PENGESAHAN	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTO	v
SANWACANA	vi
DAFTAR ISI.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan pengertian pemberdayaan	15
2.2 Definisi kawasan rumah pangan	15
2.2.1 Rumah pangan lestari dengan teknik budidaya hidroponik	15
2.2.2 Perencanaan dan pelaksanaan model KRPL.....	16
2.2.3 Budidaya melon dengan teknik hidroponik dengan media tanam pasir krikil	19
2.2.4 Sayuran sehat dan segar dengan teknik budidaya hidroponik (lokasi baso, Bukit Tinggi-Sumbar).....	20
2.3 Pemanfaatan pekarangan	21
2.3.1 Fasilitas pekarangan.....	22
2.3.2 Zonasi pekarangan	22
2.4 Tinjauan pemberdayaan	25
2.4.1 Pengertian pemberdayaan	25
2.4.2 Dasar pemikiran filosofis pemberdayaan	28
2.4.3 Indikator adanya keberdayaan	29
2.4.4 Paradigma dalam aktifitas pemberdayaan	30
2.4.5 Tahap-tahap pemberdayaan	32
2.5 Tinjauan pengentasan kemiskinan	33
III. METODE PENELITIAN	44
3.1 Tipe dan pendekatan Penelitian	44
3.2 Fokus penelitian	44
3.3 Lokasi penelitian	45
3.4 Teknik pengumpulan data.....	45
3.5 Teknik analisis data.....	48

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	49
4.1 Sejaran desa kediri	49
4.2 Peta dan kondisi desa	50
4.3 Komoditas unggulan petani dan peternak KRPL sekar tani	55
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
5.1 Fungsi KRPL dalam mengentaskan kemiskinan di desa kediri	58
5.2 KRPL berfungsi sebagai unit usaha tani	59
5.3 Menyusun rencana definitive KRPL dan melaksanakan kegiatan atas dasar perseimbangan efisiensi.....	62
5.4 Memfasilitasi penerapan teknologi usaha tani anggota sesuai dengan rencana KRPL	67
5.5 Menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani	67
5.6 Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan KRPL ...	72
5.7 Meningkatkan keseimbangan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan	74
5.8 Merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala baik di KRPL maupun dengan pihak lain	75
5.9 Mengidentifikasi serta menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki.....	79
5.10 Rencanakan kebutuhan pasar dengan memperhatikan segmentasi pasar	80
5.11 Mengembangkan penyediaan komoditi yang dibutuhkan KRPL ...	81
5.12 KRPL berfungsi sebagai unit usaha keuangan mikro	82
5.13 Kelemahan penelitian.....	86
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	87
6.1 Simpulan	87
6.2 Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, suatu bangsa dituntut mampu menyusun strategi pembangunan yang tepat dan berkelanjutan untuk memajukan bangsanya. Pembangunan dapat berupa pembangunan fisik maupun sumber daya lainnya yang mengarah pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi berkelanjutan sangatlah penting karena berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Suatu negara dapat dikatakan maju apabila kesejahteraan sudah dapat dirasakan oleh sebagian besar warganya.

Masing-masing elemen memiliki peran yang berbeda namun harus saling berintegrasi dan bersinergi agar lebih cermat dalam mengamati dinamika masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi tersebut akan mampu meningkatkan efisiensi dalam menyusun manajemen pembangunan terutama pembangunan masyarakat desa. Tujuan pembangunan akan tercapai sesuai dengan harapan apabila partisipasi berlangsung secara komprehensif.

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam berlimpah baik berupa rempah-rempah maupun hasil pangan seperti umbi-umbian, beras dan jagung. Berdasarkan

kondisi tersebut, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Dataran dan tanah yang subur yang tersebar di seluruh kepulauan di Nusantara merupakan potensi wilayah yang membuka kesempatan bagi warganya untuk bercocok tanam dan beternak sehingga bidang pertanian mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kontribusi tersebut dibuktikan dengan tercapainya swasembada pangan pada era Orde Baru. Perkembangan variasi komoditas direzim yang baru ini dapat terlihat ketika peningkatan ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada beras saja melainkan jagung menjadi kekuatan utama untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian mayoritas angkatan kerja di Indonesia. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, pertumbuhan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan gizi dan ketahanan pangan rumah tangga, dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Petani di pedesaan merupakan keluarga yang produktif karena tidak hanya kepala keluarga saja yang bekerja. Namun, melibatkan istri dan melatih anak-anaknya yang sudah mulai beranjak remaja untuk terlibat dalam kegiatan usaha taninya. Hal tersebut mendukung terbentuknya kelompok tani (poktan) dan kelompok wanita tani (KWT).

Keterlibatan wanita dalam mengatasi masalah ekonomi rumah tangga petani merupakan upaya untuk menanggulangi kemiskinan . Berpedoman kepada pendapatan rumah tangga yang dapat dihasilkan oleh suami maupun istri (pola nafkah ganda), wanita memiliki peluang kerja yang dapat menghasilkan pendapatan bagi rumah tangganya, sebagai upaya mengurangi kemiskinan di pedesaan. Istri-istri petani terjun sebagai pelaku usaha dan memiliki pendapatan. Peran serta wanita tani tersebut belum dapat mengoptimalkan usaha yang dikelolanya. Karena, beberapa faktor sebagai berikut: (1) keterbatasan modal, (2) rendahnya kesadaran istri petani untuk bergabung ke dalam KWT, (3) kurangnya pembinaan dari Pemerintah tentang pentingnya peran KWT dalam kehidupan petani. Faktor-faktor tersebut

menyebabkan masih tingginya jumlah petani miskin di desa tersebut. Untuk itu Kementerian Pertanian menginisiasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Rumah Pangan Lestari (RPL).

Menurut Wahyuni (2003:22), kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dimaksudkan sebagai wadah komunikasi antar petani, serta antara petani dengan kelembagaan terkait dalam proses alih teknologi. Surat keputusan tersebut dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan atau tolak ukur untuk memonitor dan mengevaluasi kinerjanya. Kinerja tersebut akan menentukan tingkat kemampuan keluarga meningkatkan penghasilan. Menurut Uasikun (1995), kemiskinan merupakan sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan sebagai sarana pemenuhan kebutuhanhidup yang paling dasar, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapital.

Fenomena yang terjadi di negara-negara berkembang adalah kecenderungan memprioritaskan pembangunan di wilayah perkotaan daripada pedesaan, misalnya membangun industri di kota-kota. Semestinya, sasaran utama pembangunan adalah masyarakat pedesaan, dengan pembangunan fisik maupun nonfisik taraf hidup masyarakat desa dapat meningkat melalui kenaikan produktivitas di bidang pertanian. Oleh sebab itu, pembangunan masyarakat pedesaan merupakan suatu upaya di dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran, penerapan teknologi dan berbagai permasalahan struktural lainnya (Hamim *et al*, 1996). Desa juga memiliki peranan yang sangat penting sebagai motor penggerak kemajuan suatu negara berkembang, Sektor pertanian dan peternakan berperan besar dalam menopang ketahanan ekonomi Indonesia. Francois Quesnay dalam Planck (1993:11) menyatakan bahwa petani dan

penggarap merupakan satu-satunya kelas produktif dalam ekonomi nasional.

Petani tanaman pangan dapat meningkatkan pendapatannya dengan cara memaksimalkan pemanfaatan lahan dengan menanam jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubikayu (Nur, 2009:228). Upaya tersebut tidak serta merta berjalan dengan baik apabila Pemerintah tidak mengakomodir kebutuhan para petani. Biasanya, masyarakat desa menggabungkan pekerjaannya sebagai petani dan peternak guna mengoptimalkan pendapatan dari lahan yang dimilikinya baik yang berukuran luas maupun sempit. Permasalahannya, petani terkadang mengalami hambatan secara individual, antara lain sulitnya mencari informasi tentang kesehatan ternak dan jenis-jenis hama serta cara menanggulangnya. Hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya hasil produksi pertanian dan peternakan. Permasalahan-permasalahan yang banyak dihadapi petani mendorong petani untuk membentuk kerjasama dalam suatu kelompok. Hal tersebut merupakan fenomena dinamika sosial. Dinamika sosial membentuk pola tingkah laku kehidupan manusia untuk saling mengisi dan melengkapi. Seiring berjalannya waktu, maka berbagai macam polemik yang terjadi di desa menjadi alasan bagi petani untuk berkolaborasi dan bermusyawarah untuk mendapatkan solusi demi kemajuan bersama.

Masyarakat desa cenderung memiliki rasa solidaritas yang lebih kuat dalam bekerjasama untuk mencapai sesuatu yang positif. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama. Pemerintah mengakomodir hal tersebut dengan cara memberi wewenang pada setiap desa untuk membangun lembaga guna memperlancar kegiatan pertanian di desa serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman pangan maupun usaha tani peternakan, perikanan, dan perkebunan. Sehubungan dengan itu, pembangunan dikatakan tidak dapat lepas dari pengaruh teknologi. Menurut Schoorl (1980:1-4), aspek yang paling penting dalam pembangunan suatu masyarakat adalah pergantian teknik produksi dari cara-

cara tradisional ke cara-cara modern. Desa sangat berperan penting dalam mempercepat pembangunankota dengan memasok bahan mentah sebagai kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Petani di desa dihadapkan oleh permasalahan yang cukup sulit dalam hal menerapkan teknologi pengolahan hasil panen, pendistribusikan/pemasaran, produksi, pengangkutan, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran. Hambatan tersebut dapat mengurangi keuntungan petani. Hal tersebut menjadi alasan yang kuat bagi Pemerintah untuk membentuk organisasi petani guna mempermudah akses Pemerintah untuk membina, melakukan pendampingan, dan penyuluhan serta penyebaran informasi. Langkah Pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam mengelola kegiatan usaha taninya secara komersil.

Kegiatan pemanfaatan pekarangan yang dikelola secara komersil diharapkan mampu menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang maksimal. Keuntungan dan pendapatan yang maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan. Kementerian Pertanian menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa yang menghadapi kesulitan dalam mengoptimalkan hasil kegiatan usaha tani pertanian tanaman pangan dan peternakan. Pemerintah pusat memberikan instruksi kepada seluruh petani di daerah untuk membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan memanfaatkan pekarangan. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Menurut De Vito dalam Hengki (2011:3), kelompok merupakan sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah. Para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang sama serta memiliki semacam organisasi atau struktur diantara mereka. Kelompok mengembangkan norma-norma, atau peraturan yang mengidentifikasi tentang apa yang dianggap sebagai perilaku

yang diinginkan bagi semua anggotanya. Pembentukan organisasi terstruktur seperti halnya Gapoktan tersebut berfungsi untuk mempermudah para petani dalam memperoleh pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan dari instansi terkait dalam upaya meningkatkan produksi pertanian secara luas. Peningkatan produktivitas tersebut pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani dan taraf hidup yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan secara bertahap. Langkah tersebut merupakan salah satu terobosan Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan melalui sektor pertanian dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Pembangunan pertanian tersebut merupakan salah satu pembangunan nasional di tingkat pedesaan dan bisa disebut sebagai *Community Development*. Pengertian umum *Community Development* menggambarkan sebuah proses yang dusahkan sendiri oleh penduduk dan bersama-sama dengan Pemerintah memperbaiki situasi ekonomi, sosial dan kultural desa, mengintegrasikannya dalam kehidupan bangsa dan membuatnya menjadi mampu memberikan sumbangan pada kemajuan nasional sepenuhnya” (B.Joerges dalam Planck, 1993:245). Gapoktan memiliki berbagai fungsi namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak masalah dan hambatan. Gapoktan dituntut mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi usaha tani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia lewat teknologi, sosial, dan sarana produksi lainnya akan tetapi secara individual anggota Gapoktan belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan seluruh fungsinya. Selain itu tidak ada pihak yang memberikan pengetahuan kepada Gapoktan secara berkala untuk membantu mereka mempersiapkan diri dalam melaksanakan fungsi tersebut. Pemerintah daerah diharapkan untuk terlibat dalam meningkatkan kualitas sumber daya anggota Gapoktan karena Gapoktan menghadapi hambatan yang cukup kompleks.

Menurut Dimiyati (1991), permasalahan yang dihadapi oleh kelembagaan petani, adalah

sebagai berikut:

1. masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran.
2. belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis.
3. aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (*on farm*).
4. peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.

Hal tersebut adalah faktor penghambat internal yang dialami para petani dan harus diatasi dengan cara memberi pemahaman kepada para petani sehingga petani di desa tersebut bisa lebih meningkatkan pendapatannya. Kemiskinan di lokasi penelitian masih sangat jelas terlihat, terbukti masih banyaknya pemuda yang menganggur karena kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya modal usaha di sektor pertanian membuat sebagian pemuda di desa tersebut memilih mencari pekerjaan ke luar kota. Kondisi pemukiman pun menjadi gambaran fisik yang nyata bahwa masyarakat di daerah tersebut masih jauh dari sejahtera. Rumah warga yang hanya terbuat dari gribik dan beratapkan jerami. Selebihnya untuk beberapa rumah dibangun semi permanen. Aspek pendidikan tidak dapat menjanjikan masyarakat untuk tumbuh lebih cerdas. Hal ini disebabkan persepsi masyarakat terhadap pendidikan cenderung pesimis. Keluarga lebih mengarahkan anak-anaknya untuk bercocok tanam dan beternak walaupun hasil yang didapat terkadang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Permasalahan yang dihadapi petani dalam kaitannya dengan peran Gapoktan belum seluruh fungsi berjalan dengan optimal. Fungsi Gapoktan sebagai unit usaha tani belum mampu mendorong peningkatan skala usaha dan produktivitas tanaman pertanian yang dikelolanya. Saat ini Gapoktan baru berhasil membantu petani untuk mempertahankan skala usaha dan produktivitas pertaniannya sehingga tidak terjadi penurunan serta tidak terjadi

penurunan jumlah anggota karena beralih pekerjaan atau merasa tidak memerlukan organisasi Gapoktan. Fungsi Gapoktan sebagai usaha pengelolaan masih belum optimal karena produk pertanian yang dihasilkan petani anggota Gapoktan masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Hal tersebut disebabkan belum mampunya Gapoktan memberikan pengarahan dan memperkenalkan teknologi baru untuk mengelola produk pertanian menjadi bahan olahan yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Fungsi Gapoktan sebagai unit usaha sarana dan prasarana produksi masih terbatas pada penyediaan pupuk dan alat-alat pertanian yang kuantitas dan kualitasnya masih terbatas. Hal tersebut mengakibatkan anggota Gapoktan harus mencari kebutuhan yang diperlukan dalam mengelola usaha taninya dengan membeli di luar Gapoktan. Gapoktan akan mendapat keuntungan dari penyediaan sarana dan prasarana produksi apabila mampu menyediakan kebutuhan petani. Fungsi Gapoktan sebagai unit usaha pemasaran masih belum optimal karena belum dapat menghimpun semua hasil pertanian untuk dipasarkan melalui satu tempat yaitu Gapoktan. Saat ini petani masih memasarkan sendiri hasil produksinya ke tempat yang sudah menjadi langganannya dengan harga yang bervariasi antar petani. Hal tersebut mengakibatkan seringkali terjadi kompetisi harga yang tidak sehat antar petani karena petani yang dapat menjual hasilnya dengan harga lebih murah akan cepat memperoleh uang walaupun keuntungan sangat rendah.

Fungsi Gapoktan sebagai unit usaha keuangan mikro masih belum berhasil karena kontribusi yang diberikan petani terhadap Gapoktan hanya berupa sumbangan rutin dan tabungan sehingga peningkatan kekayaan Gapoktan sangat rendah. Gapoktan akan mampu menghimpun dana yang lebih besar apabila seluruh fungsi Gapoktan berjalan dengan baik sehingga petani mengandalkan teknologi pengelolaan, penyediaan sarana dan prasarana produksi, memasarkan produk pertaniannya pada Gapoktan. Ketergantungan finansial yang

diberikan pada Gapoktan.petani pada Gapoktan menyebabkan besarnya kontribusi ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan. Hal ini menjadi prioritas pembangunan pertanian nasional dari waktu ke waktu. Ke depan, setiap rumah tangga diharapkan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki termasuk pekarangan, dalam menyediakan pangan bagi keluarga.

Kementerian Pertanian menginisiasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). KRPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Apabila RPL dikembangkan dalam skala luas, berbasis dusun (kampung), desa, atau wilayah lain yang memungkinkan, penerapan prinsip Rumah Pangan Lestari (RPL) disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Prinsip dasar KRPL adalah: (i) pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan, (ii) diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, (iii) konservasi sumberdaya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), dan (iv) menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa menuju (v) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas fungsi Gapoktan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat desa?
2. Apa saja faktor penghambat program Gapoktan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis fungsi Gapoktan Sulahudin di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat program Gapoktan Sulahudin yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dalam rangka *pengentasan* kemiskinan masyarakat desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas maka penelitian tersebut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi empirik dan pengetahuan seputar pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup melalui Gapoktan.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para peneliti tentang peranan lembaga yang berorientasi pada kelompok masyarakat.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri

2.2 Tinjauan Kelompok Tani

2.2.1 Pengertian kelompok

Pengertian kelompok cukup bervariasi tergantung pada sudut pandang para ahli yang mendefinisikannya. Adapun sudut pandang dari beberapa ahli antara lain meliputi pandangan yang mendasarkan pada persepsi, motivasi, tujuan kelompok, organisasi kelompok, interdependensi dan interaksi. Mayor Polak (dalam Abdul Syani, 1987:98) menguraikan tentang pengertian kelompok berdasarkan persepsi bahwa kelompok atau grup merupakan sejumlah orang yang ada dalam hubungan antara satu sama lain dan antara hubungan itu bersifat sebagai sebuah struktur. Menurut Abdul Syani (1987:102), sejumlah rangkaian atau sistem yang dapat menyebabkan kelompok dapat dikatakan berstruktur, yaitu:

1. Adanya sistem dari status-status para anggotanya. Ia memiliki susunan pengurus yang merupakan suatu rangkaian yang bersifat hierarkis.
2. Terdapat atau berlakunya nilai-nilai, norma-norma (kebudayaan) dalam

mempertahankan kehidupan kelompoknya yang berarti bahwa keberhasilan struktur selalu diutamakan.

3. terdapat peranan-peranan sosial (*social role*) yang merupakan aspek dinamis dari struktur.

Johnson dan Johnson (dalam Sarwono, 2005:4-1) mendefinisikan kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi melalui tatap muka (*face to face interaction*), dan masing-masing menyadari keanggotaannya dalam kelompok, masing-masing menyadari keberadaan anggota kelompok lainnya, masing-masing menyadari saling ketergantungan secara positif dalam mencapai tujuan bersama.

Kelompok adalah individu-individu yang hidup bersama dalam satu ikatan, yang dalam satu ikatan terjadi interaksi sosial dan ikatan organisasi antar anggota masing-masing kelompok sosial (Soerjono Dirdjosisworo, 1981:47). Kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan pola interaksi yang nyata dan dapat membentuk satu kesatuan (Wiratmadja, 1973:64), Soetamo (1994:31-34) dalam buku Psikologi Sosial mengutip hasil penelitian para ahli sosiologi dan ahli psikologi sosial yang menyatakan bahwa kelompok sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. adanya motif yang sama

Kelompok sosial terbentuk karena anggota-anggotanya mempunyai motif yang sama. Motif yang sama tersebut merupakan pengikat sehingga setiap anggota kelompok tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sesudah kelompok sosial terbentuk biasanya muncul motif baru yang memperkokoh kehidupan kelompok sehingga timbul *sense of belonging* (rasa menyatu di dalam kelompok pada tiap-tiap anggota). Rasa tersebut

berpengaruh besar terhadap individu dalam kelompok itu karena memberikan tenaga moral yang tidak akan diperolehnya apabila seseorang hidup sendiri. Selain itu, seseorang yang bergabung dalam kelompok sosial maka kebutuhannya sebagai makhluk sosial dan makhluk individu akan terpenuhi.

b. Adanya sikap *in-group* dan *out-group*

Sekelompok manusia yang mempunyai tugas yang sama sulitnya atau mengalami kepahitan hidup bersama pada umumnya menunjukkan tingkah laku yang khusus. Apabila orang lain di luar kelompok itu bertingkah laku seperti mereka, mereka akan menyingkirkan diri. Sikap menolak yang ditunjukkan oleh kelompok itu disebut sikap *out-group* atau sikap terhadap “orang luar”. Kelompok manusia yang dianggap sebagai *Community Development* tersebut menunjukkan pada orang luar tentang kesediaannya berkorban bersama dan kesetiakawanannya, Selanjutnya mereka menerima orang itu dalam segala kegiatan kelompok. Sikap menerima itu disebut sikap *in-group* atau terhadap “orang dalam”.

c. Adanya solidaritas

Solidaritas adalah sikap kesetiakawanan antar anggota kelompok sosial. Sikap solidaritas yang tinggi dalam kelompok tergantung pada kepercayaan setiap anggota terhadap kemampuan anggota lain untuk melaksanakan tugas dengan baik. Pembagian tugas dalam kelompok sesuai dengan kecakapan masing-masing anggota dan keadaan tertentu akan memberikan hasil kerja yang baik. Dengan demikian, semakin tinggi sikap solidaritas antar anggota kelompok maka semakin tinggi pula *sense of belonging*.

d. Adanya struktur kelompok

Struktur kelompok merupakan suatu sistem relasi antar anggota-anggota kelompok berdasarkan peranan status mereka serta sumbangan masing-masing dalam interaksi terhadap kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Wila Huky (dalam Abdul Syani, 1987:99), bahwa kelompok merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Huky secara lebih rinci menjelaskan beberapa ciri dasar suatu kelompok sebagai berikut:

1. kelompok terdiri dari paling sedikit dua orang dan dapat terus bertambah menjadi lebih dari dua.
2. kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak dianggap terbentuk karena memenuhi persyaratan jumlah.
3. komunikasi dan interaksi yang merupakan unsur pokok suatu kelompok harus bersifat timbal balik.
4. kelompok-kelompok bisa bertahan sepanjang hidup atau dalam jangka panjang tetapi juga bisa hanya dapat bertahan sementara atau jangka pendek.
5. minat dan kepentingan bersama merupakan dasar utama pembentukan kelompok.

Pembentukan kelompok dapat berdasarkan situasi yang beraneka ragam yang dalam situasi tertentu manusia dituntut untuk bersatu.

2.2 Definisi dan pengertian KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)

Kawasan Rumah Pangan Lestari diwujudkan dalam satu Rukun Tetangga atau Rukun Warga/Dusun (Kampung) yang telah menerapkan prinsip Rumah Pangan Lestari dengan menambahkan intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya (Sekolah, rumah ibadah dan lainnya), lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.

Kementrian Pertanian telah menyusun konsep Model Kawasan Rumah Pangan Lestari yang merupakan himpunan dari Rumah Pangan Lestari (RPL) yaitu rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutannya, pemanfaatan pekarangan dalam konsep model KRPL dilengkapi dengan kelembagaan kebun bibit Desa, Unit pengolahan serta pemasaran untuk penyelamatan hasil yang melimpah (Kementrian Pertanian, 2011).

2.2.1 Rumah Pangan Lestari Dengan Teknik Budidaya Hidroponik

Berdasarkan pemikiran tersebut, seperti tertuang dalam Pedoman Umum Model KRPL (Kementrian Pertanian, 2011), tujuan pengembangan Model KRPL adalah:

1. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari,

2. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan diparkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos,
3. Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan, dan
4. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri.

Terong Hijau Teknik Budidaya berkelanjutan dengan sistem Organik menggunakan Kompos berdasarkan tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai dari Model KRPL ini adalah berkembangnya kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari, menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera (Kementrian Pertanian, 2011)

2.2.2 Perencanaan Dan Pelaksanaan Model KRPL

Untuk merencanakan dan melaksanakan pengembangan model KRPL, dibutuhkan sembilan tahapan kegiatan seperti telah dituangkan dalam pedoman umum model KRPL (Kementrian Pertanian, 2011), yaitu :

1. Persiapan, yang meliputi:
 - a. Pengumpulan informasi awal tentang potensi sumber daya dan kelompok

sasaran

- b. Pertemuan dengan dinas terkait untuk mencari kesepakatan dalam penentuan calon kelompok sasaran dan lokasi
 - c. Koordinasi dengan dinas pertanian dan dinas terkait lainnya di Kabupaten/Kota
 - d. Memilih pendamping yang menguasai teknik pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
2. Pembentukan kelompok : Kelompok sasaran adalah rumah tangga atau kelompok rumah tangga dalam satu Rukun Tetangga, Rukun Warga atau satu dusun/kampung. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif, dengan melibatkan kelompok sasaran, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Kelompok dibentuk dari, oleh dan untuk kepentingan para anggota kelompok itu sendiri. Dengan cara berkelompok akan tumbuh kekuatan gerak dari para anggota dengan prinsip keserasian, kebersamaan dan kepemimpinan dari mereka sendiri.
3. Sosialisasi: menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dan membuat kesepakatan awal untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap kelompok sasaran dan pemuka masyarakat serta petugas pelaksana instansi terkait.
4. Penguatan kelembagaan kelompok, dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok:
- a. Mampu mengambil keputusan bersama melalui musyawarah
 - b. Mampu menaati keputusan yang telah ditetapkan bersama
 - c. Mampu memperoleh dan memanfaatkan informasi

- d. Mampu untuk bekejasama dalam kelompok (sifat kegotong royongan)
 - e. Mampu untuk bekejasama dengan aparat maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
5. Perencanaan kegiatan: melakukan perencanaan atau rancang ban gun pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam dengan berbagai tanaman pangan, sayuran dan obat keluarga, ikan dan temak, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, kebun bibit desa, serta pengelolaan limbah rumah tangga. Selain itu dilakukan penyusunan rencana keija untuk satu tahun. Kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan kelompok dan dinas instansi terkait.
 6. Pelatihan: pelatihan dilakukan sebelum pelaksanaan dilapangan. Jenis pelatihan yang dilakukan diantaranya teknik budidaya tanaman pangan, buah dan sayuran, toga, teknik budidaya ikan dan temak, pembenihan dan pembibitan, pengolahan hasil dan pemasaran serta teknologi pengelolaan limbah rumah tangga. Jenis pelatihan lainnya adalah tentang penguatan kelembagaan.
 7. Pelaksanaan : pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh kelompok dengan pengawalan teknologi oleh peneliti dan pendampingan antara lain oleh penyuluh dan petani andalan. Secara bertahap dalam pelaksanaannya menuju pada pencapaian kemandirian pangan rumah tangga, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, konservasi tanaman pangan untuk masa depan, pengelolaan kebun bibit desa dan peningkatan kesejahteraan.
 8. Pembiayaan : bersumber dari kelompok, masyarakat, partisipasi pemerintah daerah dan pusat, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta dan dana lain yang tidak mengikat.

9. Monitoring dan Evaluasi, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menilai kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan. Evaluator dapat dibentuk oleh kelompok dan dapat juga berfungsi sebagai motivator bagi pengurus, anggota kelompok dalam meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya yang tersedia dilingkungannya agar berlangsung lestari.

2.2.3 Budidaya Melon Dengan Teknik Hidroponik Menggunakan Media Tanam Pasir Kerikil.

Model KRPL dilaksanakan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan terkait pusat danyang masing-masing bertanggung jawab terhadap sasaran atau keberhasilan kegiatan. Secara rinci peran setiap elemen tersebut dapat disimak dibawah:

1. Masyarakat

- Kelompok Sasaran = Pelaku utama
- Pamong Desa (RT, RW, Kasun) dan tokoh Masyarakat = Pendamping/Monitoring dan Evaluasi

2. Pemerintah daerah (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan Lembaga Terkait lainnya.

Tugas/peran dalam kegiatan:

- Pembinaan dan pendampingan kegiatan oleh petugas lapangan.
 - Penanggung jawab keberlanjutan kegiatan.
 - Replika kegiatan kelokasi lainnya.
3. Prokja 3, PKK, Kantor Ketahanan Pangan sebagai koordinator lapangan.

4. Dirjen Komoditas dan Badan Lingkup Kementerian Pertanian sebagai Pengembangan Model sesuai Tupoksi instansi
5. Badan Litbang Pertanian Berperan untuk Membangun Model KRPL dan narasumber dan Pengawasan inovasi teknologi dan kelembagaan.
6. Perguruan Tinggi/Swasta/LSM sebagai dukungan dan Pengawasan.
7. Pengembang Perumahan berperan untuk Fasilitasi Pemanfaatan lahan kosong dikawasan perumahan. (Sumber: Pedoman Umum Model KRPL, Kementerian Pertanian, 2011)

2.2.4 Sayuran sehat dan segar dengan teknik budidaya Hidroponik (Lokasi Baso, Bukit Tinggi - Sumbar)

Selanjutnya Badan Litbang mengembangkan 6 konsep dalam Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), yaitu:

1. Kemandirian pangan rumah tangga pada suatu kawasan,
2. Diversifikasi pangan yang berbasis sumber daya lokal,
3. Konservasi tanaman-tanaman pangan maupun pakan termasuk perkebunan, hortikultura untuk masa yang akan datang,
4. Kesejahteraan petani dan masyarakat yang memanfaatkan Kawasan Rumah Pangan Lestari,
5. Pemanfaatan kebun bibit desa agar menjamin kebutuhan masyarakat akan bibit terpenuhi, baik bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, termasuk ternak, unggas, ikan dan lainnya,
6. Antisipasi dampak perubahan iklim.

2.3 Pemanfaatan Pekarangan

Pekarangan merupakan sebidang tanah di sekitar rumah yang mudah di usahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga. Pekarangan sering juga disebut sebagai lumbung hidup, warung hidup atau apotik hidup.

Pemanfaatan Pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan, sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beranekaragam secara terus menerus, guna pemenuhan gizi keluarga. Lahan pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna. Fungsi pekarangan adalah untuk menghasilkan :

- a. bahan makan sebagai tambahan hasil sawah dan tegalnya;
- b. sayur dan buah-buahan;
- c. unggas, ternak kecil dan ikan;
- d. rempah, bumbu-bumbu dan wangi-wangian;
- e. bahan kerajinan tangan;

Usaha di pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi pekarangan, disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga. Dari hasil penelitian di Yogyakarta (Peny, DH dan Benneth Ginting, 1984), secara umum pekarangan dapat memberikan sumbangan pendapatan antara 7% sampai dengan 45%.

Selada dengan teknik budidaya Hidroponik DFT (Deep Flow Technique).

2.3.1 Fasilitas Pekarangan.

Dalam pekarangan dilengkapi beberapa fasilitas yang merupakan kebutuhan anggota keluarga yaitu: Lahan pertanaman, Kandang ternak, Kolam ikan, Lumbung atau gudang, Tempat menjemur hasil pertanian, Tempat menjemur pakaian, Halaman tempat bermain anak-anak, Bangku, Sumur, Kamar mandi, Tiang bendera, Tiang lampu, Garasi, Lubang sampah, Jalan setapak, Pagar, Pintu Gerbang dan lain-lain.

2.3.2 Zonasi Pekarangan

Zona pekarangan dibagi menjadi halaman depan (buruan), halaman samping (pipir) dan halaman belakang (kebon). Halaman depan merupakan area penempatan lumbung, tanaman hias, pohon buah, tempat bermain anak, bangku taman, tempat menjemur hasil pertanian, halaman samping adalah tempat jemur pakaian, pohon penghasil kayu bakar, bedeng tanaman pangan, tanaman obat, kolam ikan, sumur dan kamar mandi dan untuk halaman belakang terdiri dari bedeng tanaman sayuran, tanaman bumbu, kandang ternak, tanaman industri.

Potensi Pemanfaatan Pekarangan

- a. Tanaman pangan: umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, buah, bumbu, obat
- b. Tanaman yang bernilai ekonomi tinggi: buah, sayuran, hias (bunga potong, tanaman pot, tanaman taman)
- c. Ternak: unggas hias, petelur, pedaging. Ikan: hias, produksi daging, dll.

Dengan teknik budidaya sebagai berikut:

1. Budidaya organik

Budidaya tanaman secara organik - sesedikit mungkin menggunakan bahan anorganik. Bahan organik berasal dari sisa kegiatan hulu pertanian. Bahan-bahan sisa kegiatan pertanian berupa sekam, arang sekam, sabut kelapa, kulit kacang tanah, serbuk gergaji, sampah daun bambu, bahkan sampah rumah tangga dan lumpur endapan kolam ikan. Teknik-teknik baru “menggunakan EM4, dekomposisi bahan organik ini menjadi kompos telah dapat dipercepat dari 2-4 bulan menjadi 2-4 minggu.

2. Vertikulture

Vertikultur adalah usaha pertanian dengan memanfaatkan semaksimal mungkin ruang dalam pengertian 3 dimensi, dimana dimensi tinggi (vertikal) dieksploitasi sehingga indeks panen persatuan luas lahan dapat dilipatgandakan dengan cara bertanam tanaman dengan media selain tanah pada bak-bak tanaman yang diatur bertangga (*Cascade planting*) struktur *etage bouw* pada pekarangan. Bertanam dalam pot-pot gantung yang mengisi penuh ruang, yang tahan teduh di bawah dan yang lebih suka panas diletakkan di atas.

3. Tabulampot

Menanam tanaman buah-buahan didalam pot, dengan syarat media tanam harus mampu menopang tanaman, dapat menyediakan hara, air dan aerasi yang baik. Menanam tanaman buah-buahan (bisa tanaman lainnya: bunga) didalam pot. Pot yang kurang baik, mempunyai aerasi yang buruk sehingga kurang menguntungkan untuk perkembangan akar.

Budidaya Semangka Konvensional pemupukan dengan sistem kocor dan sprayer

Nutrisi Pemanfaatan Pekarangan Pola KRPL. Pola Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan aktualisasi pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal dengan maksimalisasi produktivitas lahan lain yang ada dilingkungannya untuk pengembangan ketersediaan pangan yang beranekaragam tiap rumah tangga dalam suatu wilayah desa/dusun/kampung. Konsep KRPL yang ditumbuh kembangkan mempunyai pengertian sebagai kawasan/ wilayah yang dibangun dari beberapa Rumah Pangan Lestari, yakni unit-unit rumah tangga yang menerapkan prinsip pemanfaatan pekarangan secara optimal yang ramah lingkungan dan ditopang pula oleh maksimalisasi produktivitas lahan di luar pekarangan di dalam kawasan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya berbasis partisipatif aktif dan kolektifitas/terintegrasi dalam masyarakatnya.

Pada hakekatnya KRPL ini merupakan suatu gerakan sekelompok masyarakat yang mandiri untuk meningkatkan kapasitas kemandirian pangannya (aspek ketersediaan, akses, dan keaneka ragaman pangan) secara bersama/ terintegrasi/ kolektifitas melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan sekitarnya secara optimal. Oleh karena itu untuk mewujudkan suatu KRPL di suatu daerah/ wilayah (dalam satuan desa/ dusun/ kampung) selain diperlukan sentuhan terhadap aspek teknis produksi dan ekonomi (*technology and economic approach*) melainkan juga yang tidak kalah urgensinya adalah adanya sentuhan perekayaan sosial yang berkaitan dengan perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas SDM masyarakatnya untuk aplikasi inovasi teknologi pertanian unggul mendukung RPL yang sehat dan bergizi.

Dalam PEDUM Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (Kementrian Pertanian, 2011) lahan pekarangan dibedakan atas pekarangan perkotaan dan perdesaan, masing-masing memiliki spesifikasi baik dalam menetapkan komoditas yang akan ditanam, besarnya skala usaha pekarangan, maupun cara menata tanaman, ternak dan ikan.

1. Pekarangan Perkotaan

Pekarangan perkotaan dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- a. Rumah tipe 21 dengan total luas tanah sekitar 36 m² atau tanpa halaman.
- b. Rumah tipe 36, luas tanah sekitar 72m² atau halaman sempit.
- c. Rumah tipe 45, luas tanah sekitar 90 m² atau halaman sedang, dan
- d. Rumah tipe 54 atau 60 dengan luas tanah sekitar 120 m² atau halaman luas.

2. Pekarangan Perdesaan

Pekarangan perdesaan dikelompokkan menjadi 4, yaitu:

- a. Pekarangan sangat sempit (tanpa halaman).
- b. Pekarangan sempit (<120 m²).
- c. Pekarangan sedang (120 - 400 m²), dan
- d. Pekarangan luas (>400 m²).

2.4 Tinjauan Pemberdayaan

2.4.1 Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual (Suharto, 2014) pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan).

Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita

untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Beberapa ahli (Suharto, 2014) di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 1997:210-224):

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et.al., 1994).
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Pemberdayaan masyarakat (Theresia, 2014) adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable* " (Chambers, 1995 dalam Kertasasmita, 1996). Dengan konsep

pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Menurut Ife (Suharto, 2014), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan, dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme

produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.

7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan, dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

2.4.2 Dasar Pemikiran Filosofis Pemberdayaan

Beberapa dasar pemikiran filosofis (Kusnadi, 2003) yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:

1. Potensi sumber daya alam yang ada di kawasan pesisir adalah karunia Allah SWT yang harus dijaga kelestariannya oleh semua pihak serta dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial-budaya dan kemakmuran ekonomi masyarakat nelayan.
2. Pengelolaan potensi sumber daya alam pesisir dan laut harus dilaksanakan oleh masyarakat pengguna berdasarkan sikap hati-hati, berorientasi pada kepentingan masa depan, serta dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap

Allah SWT dan anak-cucu mereka karena sesungguhnya potensi sumber daya alam tersebut adalah pinjman anak-cucu.

3. Negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumber daya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir.
4. Negara, masyarakat, dan pihak lain bertanggung jawab untuk melindungi kelestarian sumber daya alam dari berbagai ancaman.
5. Kawasan pesisir merupakan “halaman depan” negara kepulauan Republik Indonesia sehingga pembangunan kawasan pesisir harus ditujukan untuk memperkuat ketahanan bangsa (masyarakat nelayan) menghadapi berbagai ancaman yang datang dari arah laut. Kerapuhan sosial ekonomi masyarakat nelayan berpotensi menjadi sumber ketidakstabilan politik kawasan.

2.4.3 Indikator Adanya Keberdayaan

Beberapa indikator kualitatif (Kusnadi, 2009) yang menandai bahwa suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi: individu, rumah tangga, dan masyarakat, yang ditandai dengan hal-hal berikut ini:
 - Kemandirian ekonomi berkembang, orientasi kewirausahaan meningkat, dan kepercayaan diri menguat.
 - Nilai tabungan dan investasi bertambah.
 - Kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi optimal dan berkelanjutan.
 - Kondisi kualitas SDM berkembang baik.

2. Kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada dapat berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil-kontinuitas.
3. Kelembagaan sosial atau pranata-pranata budaya berfungsi dengan baik sebagai instrumen aspirasi pembangunan lokal.
4. Potensi sumberdaya lingkungan sebagai basis kehidupan masyarakat pesisir terpelihara kelestariannya dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.
5. Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi: informasi, kapital, pasar, teknologi, dan jaringan kemitraan.
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir.
7. Kawasan pesisir menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tank investasi.

2.4.4 Paradigma Dalam Aktivitas Pemberdayaan

Aktivitas pemberdayaan masyarakat dukungan fasilitas yang bersifat fisik, seperti modal usaha, teknologi, dan pelatihan lebih dipahami sebagai sarana penunjang untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Esensi pemberdayaan sebenarnya sangat terkait erat dengan rekayasa sosial (*social engineering*) dan perubahan kebudayaan masyarakat.

Memahami kedua unsur yang membangun esensi pemberdayaan ini, aktivitas pemberdayaan diarahkan untuk menyiapkan masyarakat memiliki cara pandang, wawasan, metode berfikir, dan perilaku budaya yang bersifat progresif, peka, dan

berorientasi masa depan, sehingga mereka mampu mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia di lingkungannya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kemakmuran yang merata. Dengan orientasi berpikir dan kapasitas diri yang optimal upaya untuk mencapai tujuan pemberdayaan yaitu kemandirian dan memanusiawikan manusia dapat dicapai secara efektif. Karena tujuan pemberdayaan dikonstruksi seperti di atas, maka aktivitas pemberdayaan masyarakat (Kusnadi,2009) didasarkan pada prinsip-prinsip tatanan pemikiran (paradigma) sebagai berikut:

1. Aktivitas pemberdayaan masyarakat merupakan aktualisasi dari tanggung jawab moral, filosofis, dan etis dari siapa pun atau lembaga, mana pun terhadap sesama warga masyarakat yang tertimpa ketidakberdayaan.
2. Aktivitas pemberdayaan adalah suatu proses sosial, sehingga kegiatan pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara instan, tanpa perencanaan yang komprehensif, dengan dimensi waktu yang memadai
3. Aktivitas pemberdayaan harus berbasis pada potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dan lingkungannya.
4. Kegiatan pemberdayaan harus ditunjang oleh hubungan dan jaringan kemitraan yang luas (partnership building) dengan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders), seperti pemerintah, perguruan tinggi, swasta (korporasi), dan LSM/LPSM.
5. Agar kegiatan pemberdayaan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan rumusan strategi atau model yang bersifat kontekstual, berbasis modal sosial-budaya masyarakat lokal, dan berorientasi kebutuhan riil yang mendesak dari masyarakat yang akan diberdayakan.

2.4.5 Tahap-tahap Pemberdayaan

Pada hakekatnya, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan proses, tanpa bermaksud menafikan hasil dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan proses, maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adi (2003 : 70-75) bahwa pemberdayaan menekankan pada *process goal*, yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (*self help*) sesuai prinsip demokratis.

Tahapan program pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Secara lebih jelas, tahap-tahap pemberdayaan dibagi ke dalam tujuh tahap,

1. Tahap Persiapan

Tahap ini mencakup tahap penyiapan petugas dan tahap penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dalam hal ini (*community worker*) merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat.

2. Tahap Pengkajian (*assesment*)

Proses assesment dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh klien.

3. Tahap Perencanaan Altematif Program atau Kegiatan dan Tahap Pemformulasian Rencana Aksi. Pada tahap ini, agen perubah (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang

masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Tahap *capacity building* dan *networking*

Tahap ini mencakup : (1). Melakukan penelitian, workshop, dan sebagainya untuk membangun kapasitas setiap individu masyarakat sasaran agar siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka, (2). Masyarakat sasaran bersama-sama membuat aturan main dalam menjalankan program, berupa anggaran dasar organisasi, sistem, dan prosedurnya, (3). Membangun jaringan dengan pihak luar seperti pemerintah daerah setempat yang dapat mendukung kelembagaan lokal.

5. Tahap pelaksanaan dan pendampingan

Tahapan ini mencakup : Melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan bersama masyarakat sasaran.

6. Tahap Evaluasi

Tahapan ini mencakup : (1). Memantau setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan, (2). Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan, (3). Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pemberdayaan. Tahap evaluasi akhir dilakukan setelah semua tahap dijalankan. Tahap evaluasi akhir menjadi jembatan menuju tahap terminasi (*phasing out strategy*)

2.5 Tinjauan Pengentasan Kemiskinan

Definisi Kemiskinan

Hall dan Midgley (2009), menyatakan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi individu yang mengalami

deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial (Friedmann,1979).

Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan seseorang untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan materinya (Oscar, dalam Suparlan, 1984). Dalam proses dinamikanya, budaya kemiskinan ini selanjutnya menjadi kondisi yang memperkuat kemiskinan itu sendiri. Keadaan tersebut di atas memberikan indikasi bahwa kemiskinan merupakan penyebab dan sekaligus dampak masing-masing faktor penyebab sekaligus juga merupakan dampak untuk dan dari faktor-faktor lainnya atau penyebab sirkuler (Rajab, 1996). Sementara itu, Harris (1984) mengatakan bahwa kemiskinan disebabkan karena keterbatasan faktor-faktor geografis (daerahnya terpencil atau terisolasi, dan terbatasnya prasarana dan sarana), ekologi (keadaan sumber daya tanah/lahan dan air serta cuaca yang tidak mendukung), teknologi (kesederhanaan sistem teknologi untuk berproduksi), dan pertumbuhan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan tingkat penghasilannya. Chambers (1983) mengemukakan bahwa sebenarnya orang-orang miskin tidaklah malas, fatalistik, boros, dungu dan bodoh, tetapi mereka sebenarnya adalah pekerja keras, cerdas dan ulet. Argumennya dilandasi bahwa mereka memiliki sifat-sifat tersebut karena untuk dapat mempertahankan hidupnya dan melepaskan diri dari belenggu rantai kemiskinan.

Menurut Soekanto (2002:365) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya

dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan bukan merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang bermatra multi dimensional. Suharto (2009:132) menyatakan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan). Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- b. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- c. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- d. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- e. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- g. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- h. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox dalam Suharto (2009: 132-133) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara

maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.

2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal diluar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Ellis dalam Suharto (2009:133) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini tidak hanya menyangkut aspek finansial tetapi juga menyangkut semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsep tersebut, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut.

Contoh pengukuran garis kemiskinan absolut tersebut adalah yang garis kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 2.100 kalori per orang per hari dan disertai dengan pendapatan tertentu atau pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia dengan standar pendapatan 1 dollar AS perorang perhari.

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material. Kemiskinan secara luas didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan baik dalam pendidikan, kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Suharto, 2009:134). Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Departemen Sosial, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, 2002:3). Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Departemen Sosial, 2001). Kebutuhan pokok dalam definisi tersebut meliputi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Kemiskinan ditinjau dari aspek politis dapat dilihat dan tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem

politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu:

- a. bagaimana orang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat.
- b. bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumberdaya yang tersedia.
- c. bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Kemiskinan dalam konteks politik dapat didefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi:

- a. modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan),
- b. sumber keuangan (pekerjaan, kredit),
- c. organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial),
- d. jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa
- e. pengetahuan dan keterampilan,
- f. informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, 2009).

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjukkan pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang

mencegah atau merintangai seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dimasyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dan dalam diri individu miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya.

Teori “kemiskinan budaya” (*cultural poverty*) yang dikemukakan Oscar Lewis dalam Suharto *et.al.*, (2009), misalnya menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumber daya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan tersebut, kemiskinan terjadi bukan karena “ketidakmauan” si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena “ketidakmauan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan orang miskin dapat bekerja.

Indonesia dilanda krisis multi dimensional yang memuncak pada periode 1997-1999. Selama kurun waktu 1976-1996 terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen namun setelah itu terjadi peningkatan jumlah orang miskin dengan tajam, terutama setelah dilanda krisis ekonomi. Studi yang dilakukan BPS, UNDP dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998 meningkat dengan tajam dari

22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa Organisasi internasional buruh atau *International Labour Organisation* (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 persen dari seluruh jumlah penduduk (BPS, 1999).

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto dalam Suharto (2009:136). data BPS juga memperlihatkan bahwa selama periode 1996-1998, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk di wilayah pedesaan dan perkotaan, masing-masing menjadi 62,72% untuk wilayah pedesaan dan 61,1% untuk wilayah perkotaan. Persentase peningkatan penduduk miskin di wilayah pedesaan terhadap total populasi (7,78%) lebih besar dibandingkan dengan perkotaan (4,72%). Jumlah orang miskin selama dua tahun terakhir ini secara absolut meningkat sekitar 140% atau 10,4 juta jiwa di wilayah perkotaan, sedangkan di pedesaan sekitar 105% atau 16,6 juta jiwa. Berdasarkan definisi kemiskinan dan fakir miskin dari BPS dan Depsos dalam Suharto (2009:136), jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2012 mencapai 1.253.834 ribu orang (Anonimus, 2013). Persentase penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total penduduk Indonesia, masing-masing 17,6 % dan 7,7 %. Hal tersebut berarti bahwa jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, maka sebanyak 18 orang diantaranya adalah orang miskin, yang terdiri dari 10 orang bukan fakir miskin dan 8 orang fakir miskin.

2. Jenis-jenis Kemiskinan

Menurut Hardiman (1982) dan Jones (1990) dalam Suharto (2009:143), pekerjaan sosial di Dunia Ketiga seharusnya lebih memfokuskan pada penanganan masalah

sosial yang bersifat makro, seperti kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah dominan di negara-negara berkembang.

Menurut Suparlan (1985), kemiskinan yang terjadi di Indonesia secara sosiologis memiliki beberapa pola, yaitu:

a. Kemiskinan Individu

Kemiskinan individu terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang dipandang oleh seseorang mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengatasi dirinya dari lembah kemiskinan.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan pengertian yang disebut dengan *social economics status* atau disingkat dengan SES (biasanya untuk keluarga atau rumah tangga). Dalam hal ini diadakan perbandingan antara kekayaan materil dari keluarga atau rukun tetangga di dalam suatu komunitas teritorial.

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial ekonomi yang sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi bagiannya. Kemiskinan struktural dipahami sebagai kemiskinan yang terjadi akibat ketidakmerataan sumberdaya karena struktur dan peran seseorang dalam masyarakat.

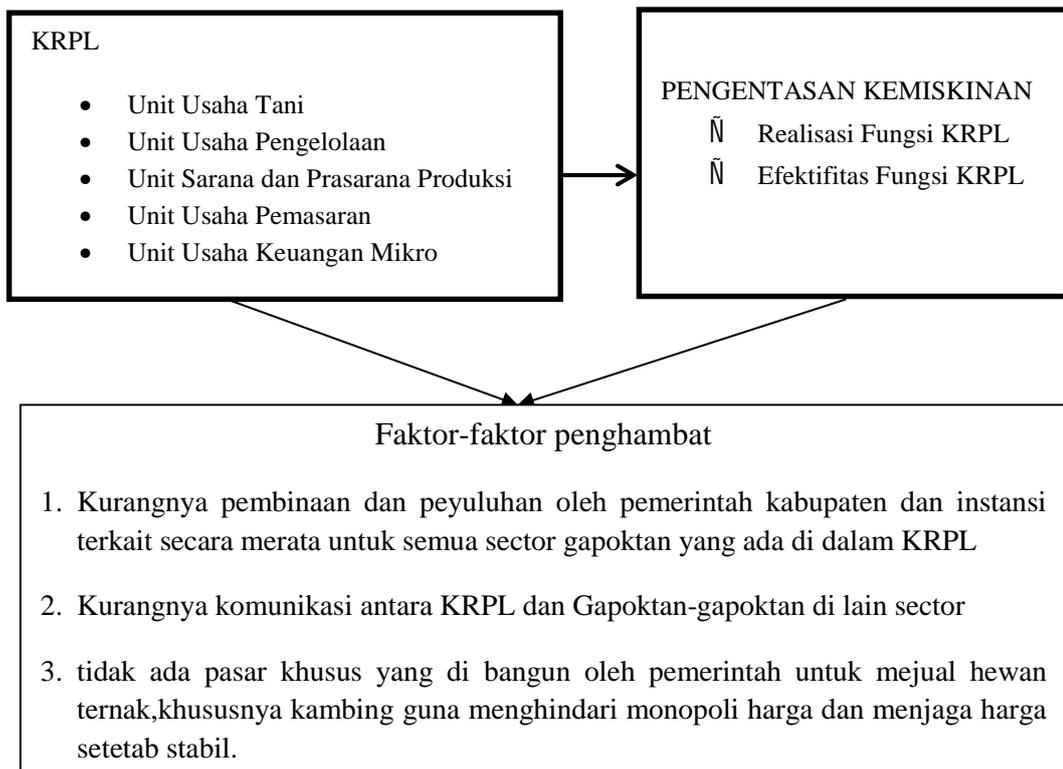
Menurut Nasikun (1995), tiga ciri kemiskinan struktural yakni:

1. jauh dari alat-alat produksi,
2. jauh dari proses pengambilan keputusan,
3. terasing dari kemungkinan partisipasi.

Kemiskinan struktural menurut teori Johan Galtung (1971) adalah kelompok yang terdapat di luar "pusat" atau yang berada di "pinggiran". Hal tersebut mengindikasikan adanya dua kelas dalam suatu negara, yakni pusat dan pinggiran. Kelas pusat punya kekuasaan secara politik, sedangkan kelas pinggiran dibisukan oleh kemiskinan buatan pusat Budiman (1996:39) memandang modernisasi didasarkan pada faktor nonmaterial penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pikiran. Menurut Arief (1977), kemiskinan struktural diakibatkan oleh bobrohnya kinerja Pemerintah, banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga distribusi kekayaan negara yang berlimpah tidak pernah sampai dan adil kepada masyarakat kelas bawah. Kekayaan negara dikuasai oleh kalangan elit tertentu, pemerintah, aparat birokrat, dan sebagian orang kalangan menengah keatas saja, yang miskin semakin susah dan melarat sedangkan yang kaya semakin haus oleh kekayaan, dan hidupnya semakin konsumtif.

Skema Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini terdapat pada Gambar 1.



III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan proses penelitian daripada hasil penelitian sehingga bukan kebenaran mutlak yang dicari tetapi pemahaman yang mendalam tentang sesuatu. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan data atau informasi yang bersifat sebenar-benarnya serta memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai informasi tentang peran Gapoktan dalam mengentaskan kemiskinan di kecamatan Gading Rejo Kabupaten Peringsewu.

3.2 Fokus Penelitian

Nazir (1988:73) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus juga merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum dan masih bersifat sementara, serta dapat berkembang atau berubah setelah peneliti turun lapangan untuk meneliti secara langsung.

Fokus penelitian ini meliputi:

- a. Efektivitas fungsi Gapoktan dalam pengentasan kemiskinan di Desa kediri, Kecamatan Gading rejo, Kabupaten Pringsewu
- b. Faktor penghambat Gapoktan dalam pengentasan kemiskinan di Desa Kediri, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa kediri, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten pringsewu. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani dan masih banyak petani yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga mudah mendapatkan responden dan narasumber yang sangat mendukung peneliti dalam menggali informasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2012:224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sutopo (2006:55), pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih mementingkan makna dan tidak ditentukan oleh kuantitasnya. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ditentukan oleh proses terjadinya jumlah (dalam bentuk angka) dan cara memandang atau perspektifnya.

3.4.1 Sumber Data

Sumber data dapat dikelompokkan menjadi sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dapat memberikan data

kepada pengumpul data, dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam dan observasi mengenai peran Gapoktan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Desa kediri, Kecamatan Gading rejo, Kabupaten pringsewu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder bersumber dari dokumentasi berupa arsip-arsip, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan aktivitas Gapoktan yang berkaitan dengan fungsinya dan faktor penghambat yang mengakibatkan masih banyaknya petani di lokasi penelitian yang masih hidup dalam kemiskinan.

3.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara Mendalam

Esterberg dalam Sugiyono (2012:232) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga maknanya dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Instrumen yang dapat digunakan dalam wawancara ini meliputi catatan kecil peneliti di lapangan, pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya seperti handphone multiguna untuk merekam dan kamera. Wawancara dilakukan terhadap responden atau informan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam menjawab dan membahas permasalahan- permasalahan dalam penelitian ini.

Responden atau informan yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Ketua Gapoktan Sekar Tani yang memiliki wilayah kerja di Desa, Kecamatan, Kabupaten.
2. Anggota Gapoktan Sekar Tani, Desa, Kecamatan, Kabupaten.
3. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) bidang pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Peringsewu.
4. PPL di Instalasi Pembibitan Kambing dan Unggas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dalam penelitian kualitatif untuk mendapat informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Nazir (1988:211), ada tiga macam observasi yaitu:

1. Observasi partisipatif

Observasi partisipatif merupakan observasi yang dilakukan peneliti dengan cara ikut terjun langsung dalam aktivitas responden atau informan yang berkaitan dengan tujuan penelitian atau obyek pengamatan. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti memperoleh data yang lengkap, tajam, dan mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang diperlihatkan responden atau informan.

2. Observasi terusterang

Observasi terusterang dilakukan peneliti dengan cara berterus terang kepada narasumber bahwa peneliti sedang melakukan pengumpulan data.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dan lain sebagainya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas Gapoktan Sekar Tani dalam menjalankan fungsinya guna mengentaskan petani anggotanya dari kemiskinan dan data-data keberhasilan Gapoktan dalam menjalankan fungsi yang telah ditetapkan dalam Permentan.

3.5 Teknik Analisis Data

Nazir (1988:211) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan aktivitas yang dilakukan peneliti setelah melakukan pengumpulan data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menemukan temuan polanya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan serta kedalaman wawasan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian dilakukan pada data yang telah direduksi dalam bentuk teks naratif. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan dan menyertakan dokumen sebagai penunjang data.

IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. SEJARAH PEKON

4.1.1. Asal-usul

Desa Kediri terbentuk pada tahun 1921 dimana yang merintis pembukaan desa adalah bapak Margo Utomo. Selama dua tahun yaitu tahun 1922, Bapak Margo Utomo memimpin desa Kediri. Kemudian pada tahun 1923, desa Kediri dipimpin oleh Wono Wijoyo, yang kemudian membagi desa Kediri menjadi dua dusun. Tahun berikutnya pada tahun 1924 Sirya Sumitro memimpin desa Kediri dan melakukan pemekaran dusun mejadi tiga dusun. Kemudian pemimpin Desa Kediri berikutnya yaitu Sastro Suparto yang memimpin sejak tahun 1924 sampai dengan 1927 dan mengadakan tanah pemakaman untuk dususn satu dan dua, dan bertambah untuk dusun tiga pada tahun berikutnya. Pada tahun 1950 sampai tahun 1954 dilakukan pengambil alihan tanah bengkok menjadi inventaris desa. Tanah tersebut pada mulanya adalah tanah yang dikelola masyarakat pada saat tebang pertama atau pembukaan desa. Sementara itu desa Kediri mempunyai balai desa pada tahun 1976, yaitu pada saat kepemimpinan Sastro Utomo. Melihat sejarah desa, maka berturut-turut yang memimpin desa Kediri sejak tahun pertama sampai saat ini adalah ;

4.1.2. Tabel 1 Sejarah Pemerintahan Desa/pekon

DAFTAR NAMA – NAMA KEPALA PEKON KEDIRI

No	Periode	Nama Kepala Pekon	Keterangan
1	1921/1922	MARGO UTOMO	
2	1923	WONO WIJOYO	
3	1924	WIRYO SENTONO	
4	1924/1927	SASTRO SUPARTO	
5	1928/1929	JARYO SANJOYO	
6	1930/1934	MARGO UTOMO	
7	1935	AHMAD KURDI	
8	1936/1937	ATMO WIJOYO	
9	1938/1949	AHMAD UMAR	
10	1950/1954	HADI SUNARTO	
11	1955/1965	AHMAD WIKARTO	
12	1966/1975	M. JUWANDI	
13	1976/1988	SASTRO UTOMO	
14	1989/1995	HARYANTO. MD	
15	1996/1997	ISMAIL	
16	1998/2001	HARIYANTO. MD	
17	2001/2002	SUDIYO UTOMO	
18	2002/2014	HERI TRINALOKA	
19	2014/2016	SUGIANTO	
20	2016/Sekarang	SUBANDI	

4.2 PETA DAN KONDISI PEKON

4.2.1 Gambaran Umum Pekon Kediri

Pekon Kediri merupakan salah satu dari 10 Pekon di wilayah Kecamatan Gadingrejo, yang terletak 15 km ke arah Utara dari kota kecamatan. Pekon

Kediri mempunyai luas wilayah seluas 285,50 hektar. Dengan jumlah penduduk 1434 jiwa berdasarkan data penduduk tahun 2016.

Iklm Pekon Kediri, sebagaimana Pekon-pekon lain di wilayah indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Pekon Kediri Kecamatan Gadingrejo.

Tabel 2. Jumlah penduduk Desa Kederi berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jiwa
1	Laki-laki	1.079
2	Perempuan	1.040
	Jumlah	2.119

Sumber: Profil Desa/Pekon Kederi (2017)

Tabel 3. Jumlah penduduk Desa Kederi berdasarkan agama yang dianut

No	Agama	Jumlah penduduk (orang)
1	Islam	1434
2	Kristen	-
3	Katolik	29
	Jumlah	1463

Sumber: Profil Desa/Pekon Kederi

Berdasarkan data pada Tabel 2 diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Kederi (1434 orang) menganut agama Islam. Masyarakat di Desa Kederi memiliki keberagaman mata pencaharian karena sebagian kecil masyarakat sudah memperoleh informasi baik dari media masa dan internet sehingga sebagian masyarakat tidak bertumpu pada profesi sebagai petani walaupun sebagian besar profesi itu masih ditekuni karena ditunjang dari keadaan geografis yang baik.

Jumlah masyarakat Desa Kederi menurut mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah penduduk Desa Kederi berdasarkan jenis pekerjaannya

Keadaan Ekonomi

A. Mata Pencaharian

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS/TNI/POLRI	23
2	PENS. PNS/TNI/POLRI	5
3	GURU	
4	BIDAN/PERAWAT	2
5	KARYAWAN SWASTA	10
6	PEDAGANG	7
7	PETANI	273
8	TUKANG	16
9	SOPIR	4
10	BURUH	324

Sumber : Profil Desa Kederi (2016)

Melihat table 4 di atas tentang jumlah penduduk desa dan jenis perkerjaan penduduk di daerah penelitian sebagian besar Petani 273 dan Buruh 324 dalam perkerjaan ini mendapat kesan kecil dalam penghasilan bahkan mendekati situasi miskin.

Banyak warga desa tersebut terutama ibu-ibu rumah tangga atau para wanita rela ikut gapoktan krpl(kawasan rumah pangan lestari)dengan program-programnya.

4.2.2 Kelembagaan Pekon

A. Pembagian Wilayah

Desa Kederi dibagi menjadi 3 dusun, yaitu: dusun 1, dusun 11 , dusun 111/ Brebes,

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RT	KETERANGAN
1	Dusun I	2	
2	Dusun II	2	
3	Dusun III	2	

4.3 Sejarah Gapoktan Sekar Tani

Gapoktan yang ada di Desa Kederi yaitu bernama Gapoktan Sekar Tani yang terletak di Dusun 2, Gapoktan Sekar Tani memiliki 3 Gapoktan dan masing-masing Dusunnya anggota Gapoktan berjumlah 15-20 anggota.

Dalam hal pemanfaatan lahan pekarangan dan hasilnya di desa ini dikuasai oleh tengkulak yang selalu memonopoli harga sehingga pemerintah Desa tidak mendapatkan keuntungan. Hal tersebut mengakibatkan kondisi ruang di Desa Kederi masih miskin. Gapoktan Sekar Tani memiliki keunggulan pada varietas jagung. Selain itu masih ada tiga keunggulan usaha tani yaitu KRPL Dusun 1 yang mengelola singkong menjadi keripik singkong dan keripik belut, KRPL Berebes yang Koptak (kelompok tani dan terak) adalah peternak kambing Boerawa. Fungsi KRPL yaitu meningkatkan pendapatan rumah tangga. KRPL yang ada di dalam Gapoktan sebenarnya mampu menyerap pekerja yang cukup banyak apabila diterapkan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Menurut Ketua Gapoktan Sekar Tani yaitu bapak/mas anwar, yang melatar belakangi terbentuknya Gapoktan Sekar

Tani adalah keadaan para petani sangat menderita, pendapatan petani dari penjualan hasil panen tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari di sebabkan sistem monopoli yang dilakukan para tengkulak.

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Anwar (Mas Aan):

“sebelum didirikan gapoktan petani disini menanam singkong dengan caranya sendiri dijual sendiri semuanya serba individual, kebanyakan petani yang kesulitan mencari bibit dan pupuk yang murah kecuali ikuti sistem tengkulak. Peralatan juga masih seadanya karena kalau beli kami tidak mampu. Harga per unitnya sangat mahal”.

Beberapa kemudahan yang diperoleh petani setelah terbentuk Gapoktan Sekar Tani antara lain:

1. Petani mudah mendapatkan bibit dan pupuk sampai memasarkan hasil panen jagung dan singkong karena pengurus Gapoktan menyediakan bibit-bibit tersebut yang lebih mudah diperoleh melalui lembaga seperti halnya Gapoktan.

Sebelum Gapoktan terbentuk para petani sangat kesulitan dalam memperoleh bibit, pupuk dan memasarkan hasil panen karena para tengkulak memberlakukan sistem monopoli. Sistem monopoli yang dimaksud yaitu semua penyediaan barang berupa alat, bibit, pupuk jagung dan singkong sampai proses penjualan dilakukan oleh satu pihak sehingga petani hanya menerima hasil penjualan.

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Anwar (Mas Aan):

“dulu sekitar tahun 2007 kebelakang pupuk kami hutang dengan tengkulak, bibit juga begitu proses pemasaran juga tidak bebas karena hanya bisa menjual kepada mereka (tengkulak), namun sejak di Bentuknya Gapoktan kami mendapat bantuan bibit, pupuk dan kami bebas menjual kemanapun asalkan mereka berani membeli dengan harga tinggi”.

2. Petani mudah memperoleh alat-alat pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani dapat menyusun alat-alat yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas petani. Sebelum Gapoktan dibentuk petani hanya menggunakan alat sederhana untuk melakukan kegiatan usaha taninya.

Berdasarkan penjelasan Bapak Anwar (Mas Aan) :

“sebelum ada gapoktan , para petani jagung melakukan perontokan biji jagung hanya dengan alat yang sederhana, dulu dengan tangan jelas memerlukan waktu dan tenaga yang banyak. Setelah itu kami beli mesin perontok jagung dengan swadaya namun hanya memiliki kapasitas kecil. Ternyata tidak meningkatkan efisiensi pekerjaan kami. Setelah dibentuknya Gapoktan kami dapat mengajukan bantuan berupa alat perontok jagung dengan kapasitas yang lebih besar”.

Dengan adanya mesin perontok jagung maka petani dapat menghasilkan jagung pipilan dalam jumlah yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan merontokkan jagung secara manual. Selain itu Gapoktan juga sudah berhasil mengajukan alat berupa hand tractor dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Peringsewu . Sebelum adanya hand tractor

menurut Bapak Untung di dalam kutipan hasil wawancara:

“*hand tractor* sangat diperlukan oleh petani untuk mengolah lahan, dulu para petani menggunakan kerbau untuk membajak lahan pertanian. Mengolah tanah dengan cara seperti itu memerlukan waktu yang lama dan mengurangi produktivitas ternak kerbau sebagai penghasil daging dan anakan. Setelah ada bantuan hand tractor petani dapat mengolah lahan pertaniannya dalam waktu yang lebih pendek dan mampu mengolah lahan yang lebih luas daripada menggunakan kerbau”.

4.3 Komoditas Unggulan Petani dan Peternak KRPL Sekar Tani

Ada dua dari empat komoditas yang diunggulkan oleh para peternak dan petani di Desa Kederi yaitu Jagung sebagai tambahan pendapatan juga sebagai pemanfaatan

lahan kosong seperti padi dan coklat.

Berikut uraian komoditas tani dan temak pada Gapoktan Sekar Tani:

a. Jagung

Jagung merupakan komoditas andalan yang ditekuni petani di Desa Kederi karena ditinjau lahan yang memiliki tipe lahan kering sehingga sangat cocok untuk ditanami jagung selain itu harga jagung sangat menjanjikan dan potensial juga biaya operasional yang cukup murah. Selain itu para petani sebagian besar adalah petani yang menggarap lahan orang lain. Mereka diberi kepercayaan untuk memanfaatkan lahan pemilik lahan untuk diberdayakan sehingga menghasilkan keuntungan dan hasilnya dibagi dua.

b. Cokelat

Sama seperti padi, komoditas coklat kurang diminati petani Sekar Tani karena mudah terserang penyakit dan hama, kengian cukup besar bahkan dalam satu periode penanaman petani hampir tidak bisa memanen karena buah kakao yang membusuk akibat penyakit. Harga coklat juga tidak stabil. Petani coklat hanya memanfaatkan lahan yang kosong dan sebagian petani menggarap lahan milik seseorang dengan sistem bagi hasil. Petani coklat biasanya memanfaatkan limbah kulit buah kakao sebagai pakan tambahan untuk hewan temak/kambing.

c. Kambing

Komoditas ternak yaitu kambing Boerawa memiliki daya tarik tersendiri karena pada dasarnya kambing Boerawa sangat potensial dan memiliki

nilai jual yang cukup menjanjikan namun permasalahannya keterbatasan modal yang disalurkan oleh pemerintah membuat para peternak terhambat mengembangkan komoditas ini. Apabila pemerintah memberikan modal dan pembinaan kepada mereka jelas para peternak akan mandiri dan mengembangkan komoditas ini secara berkelanjutan.

VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakan penelitian petani Desa Kediri yang tergabung dalam KRPL Sekar Tani, maka dapat disimpulkan :

KRPL Sekar Tani di Desa Kediri belum sepenuhnya melakukan 5 fungsi KRPL dari Permentan. 5 fungsi tersebut yaitu :

- a) Sebagai Unit Usaha Tani
- b) Sebagai Unit Usaha Pengolahan
- c) Sebagai Unit Sarana dan Prasarana
- d) Sebagai Unit Usaha Pemasaran
- e) Sebagai Unit Usaha Keuangan Mikro

Dari kelima fungsi KRPL menurut Penentan, fungsi paling efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Petani yang telah dilaksanakan oleh KRPL Sekar Tani adalah fungsi yang pertama yaitu fungsi KRPL Sabagai Unit Usaha Tani. Hal tersebut disebabkan oleh berfungsinya ketujuh unsur dari fungsi KRPL sebagai Unit Usaha Tani dengan optimal. KRPL Sekar Tani sudah melaksanakan seluruh unsur fungsi KRPL tersebut terutama untuk komoditas Jagung.

Jagung yang dihasilkan oleh KRPL Sekar Tani sudah di terima pasar secara luas dan jagung tersebut di nyatakan sebagai varietasi unggulan oleh konsumen dan pemerintah.

Fungsi yang paling tidak efektif adalah fungsi kelima yaitu KRPL berfungsi sebagai Unit Usaha Keuangan Mikro hal tersebut disebabkan oleh kurang mampunya pengurus KRPL untuk mengelola keuangan dengan sistem yang baik sehingga kelompok tidak mampu menyediakan pendanaan sendiri.

1. Faktor-faktor yang menghambat kinerja KRPL adalah :

- a. Kurangnya pembinaan dan penyuluhan oleh pemerintah kabupaten dan instansi terkait secara merata untuk semua sektor gapoktan yang ada di dalam KRPL.
- b. Pemahaman para peternak kambing yang belum terbuka dan berfikir kedepan bahwa beternak kambing dapat meningkatkan kesejahteraan hidup karena harga jual yang tinggi.
- c. Tidak ada pasar khusus yang di bangun oleh pemerintah untuk menjual hewan temak, khususnya kambing guna menghindari monopoli harga dan menjaga agar harga tetap stabil.
- d. Kurangnya komunikasi antara KRPL dan gapoktan-gapoktan di lain sektor.

KRPL hanya berkonsentrasi pada komoditas jagung yang menguntungkan. Padahal di dalam organisasi perlu merangkul bidang- bidang yang berbeda guna meningkatkan kesejah terahan bersama Komunikasi yang

tidak di bangun secara baik mengakibatkan terhambatnya perkembangan tiap kelompok tani maupun temak..

6.2 Saran

1. Perlu adanya pembinaan, penyuluhan dan pendampingan kepada seluruh anggota KRPL untuk melaksanakan 5 fungsi KRPL dan menyusun strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh dari pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Instansi terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 mengenai fungsi KRPL.
2. Pemerintah perlu memberikan bantuan modal untuk setiap gapoktan guna meningkatkan kinerja masing-masing gapoktan, baik dalam bentuk uang maupun sarana dan prasarana produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus.2010. *Pedoman Umum Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2010*.
- Anonimus.2011. *inventarisasi dan publikasi data pembangunan,badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi lampung*:<http://forumdata.lampungprov.go.id/jumlaah-kelompok-tani-di-provinsi-lampung-tahun-2012.html>.(diakses tanggal 18 oktober 2013)
- Anonimus 2012. *Impor beras, produksi di anggap belum cukup*:
<http://www.bisnis.com/articles/impor-beras-produksi-dianggap-belum-cukup-untuk-cadangan-stokpangan.html>.(diakses tanggal 21 oktober 2013)
- Anonimus.2013.<http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-kelompok-definisi-menurut-para-ahli.html>.(diakses tanggal 21 oktober 2013)
- Anonimus.2013. *Kemiskinan di provinsi lampung* .tribunnews.com .(diakses pada tanggal 21 oktober 2013)
- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi sistematika,teori dan terapan* .Jakarta. Bumi aksara
- Apriyanto, A. 2005. *peraturan menteri pertanian*:
<http://kelembagaan.wordpress.com/kelembagaan-petani/peraturan-menteri-pertanian/>.(diakses 12 oktober 2013)
- Astute, H. S. 2013. *Peran penyuluh pertanian dalam meningkatkan fungsi Gapoktan.CYB-EXT Cyber-Extension. badan peyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. kementerian pertanian repoblik Indonesia.*
<http://cybex.deptan.go.id/peyuluhan/peran-peyuluhan-pertanian-dalam-meningkatkan-fungsi-gapoktan>.(diakses 23 desember 2013)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Budiman,a.1996.*teori-teori pembangunan dunia ketiga*.jakarta.gramedia pustaka
- Departemen pertanian,2007.*Peraturan Menteri Pertanian No 237/Kpts/OT.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani*.Lampiran 1 Pedoman penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
- Dimiyati,a.,K.Suradisasta,A.Taher.1991.*sumbangan pemikiran bagi pembangunan pertanian di irian jaya*(73 halaman).badan peneliti dan pengembangan pertanian.departemen pertanian.jakarta.

- Elizabeth,R.2008. “*Peran ganda wanita Tani dalam mencapai ketahanan pangan rumah tangga di pedesaan.*” Jurnal iptek tanaman pangan vol.3 no.1-2008.
- Hamim, A, M. Adimihardja, dan R. puspawidjaja 1996. *Mahasiswa dan pembangunan masyarakat.* Universitas Lampung.
- Nasikun., 1995. *Kemiskinan di Indonesia menurun.* Airlangga univercitypress. Surabaya.
- Nazir, M. 1988. *Metode penelitian.* Ghalia Indonesia.
- Planck, U. 1993. *Sosiologi pertanian.* Jakarta. Yayasan obor Indonesia.
- Redfield, R. 1985. *Masyarakat petani dan kebudayaan.* Jakarta. CV. Rajawali.
- Sarwono, S. W. 2005. *Psikologi sosial: psikologi kelompok dan psikologi terapan.* Jakarta balai pustaka.
- Secretariat jendral MPR RI. 2012. *Panduan pemasyarakatan UUD NKRI 1945 dan ketetapan MPR RI.* Jakarta. Setjen MPR RI.
- Soekamto, S. 1987. *Sosiologi suatu pengantar.* Jakarta. Rajawali pers.
- Wahyuni, S. 2003. *Kinerja kelompok tani dalam sistem usaha tani padi dan metode pemberdayaannya.* Pusat penelitian dan pengembangan sosial ekonomi pertanian. Vol. 1 no.22.
- Weaver, R. D. 1983. “*Multiple input, multi output production choices and technology in the U.S. Wheat Region.*” American journal of Agricultural economics.
- Yunia, N. 2012. *Pemberdayaan:* <http://nadayunia.blogspot.com/2012/06/pemberdayaan-masyarakat-petani-dalam.html>.Diekses tanggal 112 oktober 2013.

Sumber internet:

<http://tanamanpangan.deptan.go.id/kategori-40-buletin.html>
jhkjhbh

http://www.bps.go.id/booklet/boklet//20november_2011.pdf.